BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ciri dari negara maju adalah negara yang masyarakatnya sadar akan membayar pajak, banyak negara maju seperti Eropa, Korea, China dan negara yang serumpun dengan kita yaitu Malaysia, masyarakatnya sudah membayar pajak hampir 100 persen, tetapi kesadaran membayar pajak di Indonesia ternyata masih sangat minim, dari jumlah penduduk sebanyak 250 juta, hanya sekitar 9 juta yang baru membayar pajak (Fuad Rahmany,2011).

Sampai sekarang masih kurang kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, pasalnya baru sekitar 7,73 persen masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak, oleh karena rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak ini, penerimaan pajak terhadap total GDP di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga (Agus Martowardojo,2011). Padahal setiap penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut melekat kewajiban menyetorkan pajak untuk kepentingan pembangunan (M Tjiptardjo,2010).

Tanpa kita sadari dengan adanya pajak, salah satu manfaat yang akan didapat adalah pembangunan sarana infrastruktur yang juga nantinya berguna bagi masyarakat (Fuad Rahmany,2011). Sejalan dengan itu, pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama untuk membiayai sumber investasi, termasuk untuk

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Manuel Pakpahan,2011). Karena melalui pajak pula, kesejahteraan, kemakmuran, dan martabat bangsa akan tercipta (Darmin Nasution,2008).

Sejatinya orang yang mempunyai penghasilan besar harus membayar pajak lebih, karena penghasilannya besar dan menjalankan usahanya di negeri ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan negara, tentu akan adil bagi yang penghasilannya tinggi membayar pajak yang tinggi (Susilo Bambang,2011). Tetapi pada kenyataanya, penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan, timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara, yang akhirnya timbul konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara, dan pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, hal ini lah yang menjadi penyebab utama masyarakat enggan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak (Siti Kurnia,2010:149). Jika wajib pajak tidak mau lagi membayar pajak maka pengaruhnya akan sangat besar dalam penerimaan negara (M Tjiptardjo,2010).

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya, untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar

penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau yang lebih sering dikenal dengan PTKP (Mardiasmo,2009:137).

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi terkait masalah perpajakan (Manuel Pakpahan,2011). Sehingga penerimaan negara makin tergerus oleh perilaku orang kaya Indonesia yang berupaya mencari negara dengan tarif pajak rendah (Andi Rahmat,2008). Padahal hanya ada dua kewajiban warga negara Indonesia (WNI) yang jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mempertahankan negara dan membayar pajak, karena sebuah negara tidak mungkin kuat jika warga negaranya enggan membayar pajak (Darmin Nasution,2008).

Pajak yang dipungut oleh negara pun akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Manuel Pakpahan,2011). Tetapi masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya sampai sekarang, baik pajak orang pribadi atau pajak badan usaha (Agus Martowardojo,2011).

Sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap uang pajak yang disetorkan akan diselewengkan, karena uang pajak yang masuk langsung masuk ke dalam sistem perbankan, seharusnya masyarakat tetap membayar pajak sebagai kewajiban terhadap negara, meskipun banyak gerakan yang menentang membayar pajak setelah kasus makelar pajak Rp 25 miliar terkuak ke muka publik (Sri Mulyani,2010).

Penghasilan kena pajak dipengaruhi oleh perencanaan pajak dan kualitas laba yang rendah (Benjamin Ayers et all,2009). Perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dari pilihan pajak yang berbeda dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam masa pajak saat ini dan masa depan, artinya perencanaan pajak dapat meminimalkan kewajiban pajak yang mana kewajiban tersebut bersumber dari penghasilan kena pajak (Anders Susan dalam Erly Suandi,2011:7).

Sejalan dengan itu pula, perencanaan pajak memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar, usaha untuk mengurangi pembayaran pajak, bukan suatu hal yang baru, bukan hanya karena permasalahan yang terjadi di bidang perpajakan Indonesia, melainkan sudah sejak lama usaha tersebut digunakan oleh beberapa perusahaan dalam mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, usaha tersebut dinamakan *tax planning* atau yang lebih dikenal dengan perencanaan pajak, yakni sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yenni Mangoting,1999).

Selain perencanaan pajak, ada pula yang dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak, yakni manajemen laba yang memiliki kualitas laba yang rendah (Linda Chen et all,2007). Manajemen laba yakni mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai

dengan keinginan manajemen, dilihat dari pengertian tersebut, jika keputusan manajemen berusaha untuk meminimalkan laba, maka tentu akan memengaruhi penghasilan kena pajak, karena laba merupakan cerminan dari penghasilan yang diperoleh (Copeland dalam Wiwik Utami,2006).

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK**".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasikan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari jumlah penduduk sebanyak 250 juta, hanya sekitar 9 juta yang baru membayar pajak.
2. Penyebab utama masyarakat enggan melaksanaan kewajiban untuk membayar pajak adalah kepentingan pribadi lebih dimenangkan dibanding kepentingan negara.
3. Saat ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi terkait masalah perpajakan.
4. Penerimaan negara makin tergerus oleh perilaku orang kaya Indonesia yang berupaya mencari negara dengan tarif pajak rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.
2. Bagaimana pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.
3. Seberapa besar pengaruh Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.

3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT XL Axiata Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaaan yang akan diperoleh dari hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi PT XL Axiata Tbk

   Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif dan sumbangan pemikiran mengenai perencanaan pajak dan manajemen laba yang akan mempengaruhi besaran penghasilan kena pajak.

2. Bagi Investor

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau masukan dalam pengembangan kajian akuntansi perpajakan yaitu mengenai mengenai perencanaan pajak dan manajemen laba pada suatu perusahaan, yang berdampak pada penghasilan kena pajak.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yaitu mengenai perencanaan pajak dan manajemen laba pada suatu perusahaan, yang berdampak pada penghasilan kena pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain di bidang yang sama, yaitu mengenai pengaruh perencanaan pajak dan manajemen laba terhadap penghasilan kena pajak pada suatu perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian perencanaan pajak dan manajemen laba, maka penelitian ini dilakukan pada PT XL Axiata Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal yang beralamatkan di jalan Veteran No 10 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	KEGIATAN SKRIPSI		BULAN & TAHUN						
			MAR 2012	APR 2012	MEI 2012	JUNI 2012	JULI 2012	AGT 2012	SEPT 2012
I.	**Persiapan Skripsi**								
	1.	Pengajuan Proposal UP							
	2.	Permohonan Ijin Melaksanakan Skripsi							
	3.	Bimbingan Usulan Penelitian							
	4.	Seminar Usulan Penelitian							
	5.	Revisi Usulan Penelitian							
II.	**Pelaksanaan Skripsi**								
	1.	Bimbingan Setelah UP							
	2.	Pendaftaran Sidang Skripsi							
	3.	Pelaksanaan Sidang Skripsi							
	4.	Selesai Pelaksanaan							